

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura bukanlah suatu hal yang baru bagi Singapura. Hal tersebut dikarenakan peran Singapura sebagai negara yang mempunyai pelabuhan, yang berfungsi sebagai hub untuk perdagangan internasional. Pada tahun 2000 hingga 2005, tercatat setidaknya terjadi kurang dari 50 kasus penangkapan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura setiap tahunnya (UNODC, 2013). Sehingga, pemerintah Singapura melalui *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) dan *Singapore Custom* selalu melakukan perbaikan sistem pelayanan dan keamanan untuk menghadapi masalah tersebut (PSA Singapore, 2017).

Dalam perdagangan internasional, perlu adanya keamanan untuk menjamin berlangsungnya aktivitas tersebut. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional suatu negara yang tidak dapat dipenuhi secara domestik. Selain itu, perdagangan internasional dapat mendorong peningkatan kualitas ekonomi suatu negara (Economy Watch, 2010). Perdagangan lintas batas ini dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur darat, laut, dan udara. Jalur darat ditempuh jika negara-negara berada pada satu benua yang sama. Sedangkan jalur laut lebih unggul dari segi kuantitas, karena mengangkut barang lebih banyak daripada melalui jalur udara. Jalur

laut inilah yang dipakai untuk mendukung perdagangan internasional dewasa ini dengan menggunakan kapal-kapal kontainer. Sedangkan dari segi regulasi, suatu negara biasanya tergabung dalam suatu organisasi internasional untuk mempunyai perjanjian kerja sama ekonomi sebagai stimulus pergerakan ekonomi dan perdagangan suatu negara.

ACFTA, atau ASEAN-China Free Trade Area, merupakan salah satu perjanjian multilateral yang melibatkan seluruh anggota ASEAN kepada Cina yang mulai diinisiasi pada tahun 2001. ASEAN melihat peluang Cina dengan alasan perekonomian Cina yang semakin maju dan berkembang menjadi entitas penggerak ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tujuan dari ACFTA adalah untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan investasi antar anggotanya, yaitu ASEAN dan Cina (International Enterprise, 2014). Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2004, diimplementasikan mulai tahun 2005, dan mewajibkan seluruh anggota ASEAN dan Cina untuk mengeliminasi tarif sampai dengan 90% mulai tahun 2010 (ASEAN China Free Trade Agreement Business Portal, 2016). Salah satu negara anggota ASEAN yang terkena dampak dari adanya perjanjian ini adalah Singapura.

Singapura merupakan negara kecil yang terletak di ujung semenanjung Malaysia dengan luas kurang dari 700 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa (Central Intelligence Agency, 2015). Negara ini menjadi kontras jika dibandingkan negara yang berada di region yang sama karena kekuatan ekonomi yang berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini didukung dengan letak geografi yang

strategis yang dilalui jalur utama perdagangan laut dunia (CSIS, 2015). Sehingga, menjadikan pelabuhan PSA Singapura menjadi jantung penggerak ekonomi negara tersebut. Jalur perdagangan laut yang melalui Asia Tenggara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Jalur Perdagangan Laut melalui Asia Tenggara



Sumber: CSIS

PSA Singapura merupakan pelabuhan yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang perdagangan yang ada di Singapura. PSA Singapura dibentuk pada tahun 1964 dan menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dengan porsi sebanyak 1/7 dari total kontainer di dunia melalui Singapura (Port of Singapore Authority, 2015). PSA beroperasi di bawah *The Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) sebagai badan negara yang mewakili Pemerintah Singapura dalam urusan kemaritiman. PSA sendiri dibangun di atas lahan seluas 710 ha dengan dilengkapi 9 terminal. Dengan

kapasitas mencapai 57 *berth*, PSA mampu menangani hingga kapasitas 40 juta TEU setiap tahunnya (PSA Singapore, 2015). Data angka bongkar muat kontainer di PSA Singapura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Angka Bongkar Muat Kontainer di PSA Singapura

	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Bongkar Muat Kontainer di Singapura (dalam Juta TEUs)	29,0	25,1	27,7	29,4	31,3	32,3	33,6
Eskalasi pertahun (dalam Persen)	+7,4	-13,4	+10,4	+6,2	+6,5	+3,1	+3,7

Sumber: *PSA International Annual Report* 2011 dan 2014

Pada tahun 2008, PSA Singapura dinobatkan sebagai pelabuhan tersibuk di dunia dengan bongkar muat kontainer sebanyak 29 juta TEUs, dengan diikuti Shanghai dan Hongkong dengan masing-masing aktivitas bongkar muat sebanyak 28 Juta TEUs dan 24,5 Juta TEUs (PSA Singapore, 2016).

Namun, dapat dilihat pada Tabel 1.1 terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada angka bongkar muat kontainer pada tahun 2010. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. ACFTA sendiri dinisaiakan oleh China pada tahun 2000 sebagai salah satu keinginan China untuk menguasai pasar ASEAN seperti Amerika Serikat, Jepang, dan European Union. Tujuan dari dibentuknya ACFTA antara lain merupakan usaha

untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan investasi antara anggotanya. Kenaikan sebanyak 10,4% pada tahun 2010 dalam angka bongkar muat kontainer di PSA Singapura sejalan dengan adanya kenaikan nilai Import Singapura dari Cina pada tahun yang sama sebanyak 21,9 %. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Nilai Total Impor Singapura dan Nilai Impor Singapura dengan Cina

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Nilai Import Singapura	356,299.2	423,221.8	458,456.1	474,462.1	466,754.5	463,778.7
Nilai Import Dari Cina (dalam ribu Dollar Amerika)	37,585,346	45,844,341	47,747,712	48,950,163	54,669,108	56,247,707
Eskalasi pertahun (dalam persen)		+21,9	+4,15	+2,51	+11,66	+2,88

Sumber: (Department of Statistic Singapore, 2016)

Dengan adanya kenaikan volume perdagangan, kemungkinan adanya barang-barang palsu yang masuk ke Singapura dapat dipastikan akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya keinginan para pedagang untuk dapat mengikuti persaingan pasar dengan menawarkan alternatif yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang cenderung lebih murah. Salah satu fokus dari adanya ACFTA antara lain untuk mendukung *Intellectual Property Right* (IPR) dengan cara memerangi barang palsu. Namun, semenjak diberlakukannya ACFTA secara efektif pada tahun 2010, terdapat

kenaikan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura melalui pelabuhan PSA Singapura. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari World Custom Organizaton – Organisation Mondiale des Douanes (WCOOMD) mengenai penyelundupan barang palsu yang ada di dunia. Singapura sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan terhadap adanya kasus penyelundupan yang terdeteksi dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Kenaikan terjadi sebesar 75% pada tahun 2010 ketika ACFTA mulai diberlakukan secara efektif. Sedangkan Cina, sebagai partner dalam ACFTA, juga menjadi penyumbang terbesar pengimpor barang palsu di dunia sejak tahun 2010 (World Custom Organization – Organisation Mondiale des Douanes, 2015).

Dari pemaparan data-data di atas, telah terjadi kenaikan penyelundupan barang palsu hingga 75% setelah diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010. Singapura sebagai sebuah kota yang maju, dengan permasalahan penyelundupan barang palsu yang naik setelah diberlakukannya ACFTA, menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa terjadi kenaikan penyelundupan barang-barang palsu yang masuk ke Singapura melalui pelabuhan PSA Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak ACFTA yang dilakukan oleh Singapura terhadap aktivitas perdagangan yang terjadi di PSA Singapura
2. Mengetahui kenaikan penyelundupan barang palsu sesudah diberlakukannya ACFTA
3. Menjelaskan penyebab meningkatnya tingkat penyelundupan barang palsu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat, baik manfaat praktis maupun teoritis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bagi peneliti mengenai hubungan antara tingkat keamanan kemajuan kota Singapura dengan tingkat keamanan PSA Singapura.

b. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengatur keamanan pelabuhan utama melalui pengaturan tata kota yang baik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya keamanan pelabuhan kepada masyarakat Indonesia agar tidak dirugikan akibat adanya penyelundupan barang palsu yang masuk ke Indonesia dengan mengacu kepada sistem yang dimiliki oleh PSA Singapura.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para akademisi Hubungan Internasional, baik untuk para pengajar maupun mahasiswa dalam mengkaji dan memahami hubungan antara tingkat kemajuan suatu kota dengan tingkat keamanan pelabuhan khususnya di Singapura, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian hubungan internasional adalah dengan menggunakan metode penelitian kriminologi yang bertujuan untuk mencari sebab, akibat, dampak, ataupun pengaruh dari sebuah kejahatan. Salah satu metode yang digunakan adalah statistik kriminal. Statistik kriminal adalah suatu penyajian data kejahatan yang tercatat di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu (Effendi, 2017). Sedangkan kejahatan sendiri secara hukum dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku dan dapat dijatuhi hukuman oleh penegak hukum yang bertanggung jawab (Bohm & Haley, 2002). Secara teoritis, aktivitas penyelundupan

barang palsu yang terjadi di pelabuhan PSA Singapura dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, adanya data mengenai angka penyelundupan barang palsu merupakan sebuah statistik kriminal yang dapat dipakai dalam melakukan sebuah penelitian.

Adolphe Quetelet menyimpulkan bahwa kejahatan seperti halnya dengan banyak kejadian sosial lainnya bukan merupakan gejala perbuatan perseorangan, melainkan sebagai fenomena yang bersifat masal, sehingga statistik kriminal menjadi metode yang lebih baik daripada metode yang lain untuk mempelajari kejahatan yang bersifat masal tersebut, yaitu dalam menemukan keteraturan, kecenderungan bahkan hukum-hukum sosial (Effendi, 2017). Quetelet kemudian menyimpulkan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan akan menurun jika tingkat kehidupan masyarakat terjadi peningkatan. Namun, G.Von Mayr, seorang ahli matematika yang melakukan penelitian mengenai kejahatan, menemukan bahwa dalam perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gandum terdapat kesejajaran. G.Von Mayr dalam bukunya *Statistic Der Gerichten Polizeiim Konigreiche Bayern Und In Einigen Andern Landern* mengungkapkan bahwa tiap-tiap kenaikan kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 18-35-1861 di Bayern, jumlah pencurian bertambah dengan 1 dari antara 100.000 penduduk. Dengan kata lain, semakin baik perkembangan ekonomi suatu wilayah, maka tingkat kejahatan pada wilayah tersebut semakin meningkat (Effendi, 2017).

Dari pemikiran Adolphe Quetelet diatas, angka kejahatan dapat di turunkan atau dihilangkan dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu, yang mempunyai pengaruh dan atau mempengaruhi adanya kejahatan tersebut. Berbeda dengan G. Von Mayr yang mengatakan bahwa kejahatan tersebut hanya dipengaruhi oleh adanya perkembangan tingkat ekonomi.

Namun baik statistik kriminal resmi maupun statistik kriminal penelitian memiliki data yang tercatat saja, sedangkan yang tidak diketahui atau tidak tercatat memiliki angka yang tidak dapat diperkirakan. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui jumlahnya ini dinamakan angka gelap (*dark numbers* atau *dark figures*). Oleh karena itu, salah satu kelemahan dari statistik kriminal adalah tidak lengkap. Dan memang statistik kriminal tidak pernah mencatat seluruh kriminalitas yang ada. Salah satu tujuan dari adanya statistik kriminal adalah untuk memperoleh gambaran/data mengenai kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya, serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu di suatu daerah atau negara.

Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang masalah berupa adanya kenaikan barang palsu yang masuk ke Singapura, dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang melanggar hukum. Sehingga angka penyelundupan barang palsu tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah statistik kriminal yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, yang bertujuan untuk mencari sebab dan akibat dari

adanya angka kejahatan tersebut. Adanya penyelundupan barang palsu tersebut menjadi salah satu ancaman ekonomi yang harus diselesaikan. Dalam penelitian ini, tingkat keamanan yang dimaksud berupa adanya angka penyelundupan barang palsu.

Upaya untuk mengamankan keadaan nasional dari adanya ancaman ekonomi, seperti adanya penyelundupan barang palsu, sudah menjadi fokus pemerintah Singapura sejak tahun 1984. Hal ini terdapat dalam sebuah konsep yang dimiliki oleh Singapura mengenai upaya untuk mengamankan negara baik dari ancaman militer maupun non-militer. Konsep tersebut dinamakan Total Defence, konsep yang pertama kali muncul pada tahun 1984 sebagai salah satu cara pemerintah dalam membentuk doktrin keamanan nasional Singapura yang mengadaptasi dari kesuksesan negara-negara seperti Swiss dan Swedia (Kuah, 2009). *Total defence* adalah sebuah konsep yang muncul dari adanya pertimbangan bahwa Singapura adalah negara kecil yang mempunyai sumber daya manusia yang terbatas yang hanya bergantung kepada aktivitas perdagangan internasional tanpa adanya sumber daya alam yang mendukung (Choon, 2004). Seluruh penduduk singapura mempunyai kewajiban untuk bertindak sesuai perannya masing-masing dalam rangka untuk membangun Singapura sebagai suatu negara yang kuat, aman, dan bersatu padu dalam menghadapi suatu bentuk ancaman (Ministry of Defence, 2015).

Ancaman yang dimaksud tidak hanya ancaman yang bersifat traditional saja, yaitu militer. Namun, dalam konsep *total defence* dijelaskan bahwa bentuk-bentuk ancaman yang dapat muncul adalah ancaman yang bersifat tradisional dan non-tradisional, seperti bencana alam, kelangkaan air dan makanan, pembajakan, imigran

ilegal, *cybercrime*, intervensi (Ministry of Defence, 2015). Oleh karena itu, konsep *total defence* dilengkapi dengan 5 pilar utama dalam rangka mempersiapkan seluruh warga singapura dalam menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang.

Tabel 1.4 Total Defence

Total Defence				
<i>Military Defence</i>	<i>Civil Defence</i>	<i>Economic Defence</i>	<i>Social Defence</i>	<i>Psychological Defence</i>
Menjaga Singapura tetap aman	Menjaga dan merawat keluarga, teman-teman, dan orang-orang disekitar kita pada saat terjadinya krisis.	Mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat dan stabil.	Hidup secara harmonis dan menjaga satu sama lain.	Menjadi seseorang yang stabil secara psikologi.

Diolah dari: *Ministry of Defence Singapore 2015*.

Kelima pilar tersebut adalah *military defence*, *civil defence*, *economic defence*, *social defence*, dan *psychological defence*. Masing-masing pilar tersebut adalah bentuk dari kerangka kerja yang mempersiapkan seluruh penduduk Singapura dalam menghadapi beberapa ancaman. Military Defence bertujuan untuk mengamankan Singapura dalam segala bentuk ancaman militer, dengan didukung oleh adanya upaya pembaharuan kualitas The Singapore Armed Forces (SAF) yang berasal dari Program Wajib Militer atau Nasional Serviceman (Ministry of Defence, 2015).

Civil defence berfokus kepada setiap individu yang disiapkan untuk dapat merespon setiap bencana alam maupun keadaan kritis lainnya secara efektif dan efisien. Sehingga diharapkan setiap individu tersebut dapat mempelajari dan mengenal

berbagai situasi darurat melalui pelatihan keadaan darurat dan program persiapan keadaan darurat dan pertolongan pertama pada keadaan darurat yang diadakan oleh Singapore Civil Defence Force setiap tahunnya (Ministry of Defence, 2015). *Social defence* mengacu kepada upaya untuk kestabilan keadaan sosial masyarakat Singapura dikarenakan adanya keberagaman suku dan agama yang ada. Sedangkan *psychological defence* adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dengan keyakinan bahwa jika setiap individu mempunyai rasa nasionalisme yang baik, maka negara akan tentram dan damai (Ministry of Defence, 2015).

Pilar terakhir adalah *economic defence*, yaitu sebuah cara untuk membangun keadaan ekonomi yang kuat dan stabil yang dapat membuat Singapura bertahan dari adanya ancaman ekonomi maupun keadaan darurat nasional. Setiap individu ditekankan untuk dapat bertanggung jawab dalam membangun kekuatan tersebut dengan cara retraining dan upgrading masing-masing individu tersebut. Selain itu, membekali diri dengan pengetahuan teknologi yang *up to date* juga merupakan keharusan, karena dengan begitu masing-masing individu akan siap menghadapi perubahan dan perkembangan jaman (Ministry of Defence, 2015). Salah satu bentuk dari *economic defence* adalah dengan dilakukannya kerja sama ekonomi seperti ACFTA.

Namun, tidak hanya individu yang berperan penting, pemerintah bekerja sama dengan para pekerja, serikat buruh, *stakeholder*, investor, dan pelaku bisnis berusaha untuk selalu memperbaiki keadaan infrastruktur dan menciptakan keadaan

ekonomi yang kompetitif. Sehingga, jika terjadi keadaan darurat maka Singapura akan mempunyai kesiapan ekonomi yang baik (Ministry of Defence, 2015).

Konsep *total defence* yang dimiliki oleh Singapura dapat dikategorikan sebagai salah satu cara untuk melakukan sekuritisasi pada ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Dalam Studi keamanan terdapat sebuah teori yang dinamakan sekuritisasi. Teori sekuritisasi muncul pada tahun 1980-an sebagai bentuk gagasan akan adanya pergeseran mengenai keamanan tradisional yang berfokus kepada aksi militer, menjadi keamanan non-tradisional yang cenderung lebih membahas isu-isu yang lebih nyata.

Teori sekuritisasi sendiri diprakarsai oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde. Teori ini menyebutkan bahwa isu keamanan nasional merupakan isu publik yang sengaja dipolitisasi melalui kebijakan publik oleh aktor sebagai sebuah ancaman. Aktor melakukan perluasan dalam berbagai bidang mengenai cakupan dari keamanan nasional melalui proses politik. Dalam teori ini, aktor melakukan politisasi terhadap isu yang sebelumnya bukan merupakan isu keamanan menjadi sebuah isu yang dapat dikatakan sebagai isu keamanan yang dibutuhkan penanganan secara cepat (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Dalam hal ini, negara menjadi salah satu aktor dalam proses sekuritisasi. Dikutip dari pernyataan Busan yang menjelaskan mengenai keamanan secara tradisional, yaitu negara dapat menyatakan sebuah kondisi darurat melalui perwakilannya, dimana negara tersebut dapat menggunakan haknya melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menghentikan ancaman yang sedang berkembang (Buzan,

Waeber, & Wilde, 1998). Melalui pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa negara memang berhak untuk melakukan sekuritisasi untuk melakukan tindakan terhadap suatu ancaman. Buzan menambahkan ancaman-ancaman tersebut dapat berupa ancaman terhadap militer, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.

Namun, negara sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi, perlu memperhatikan beberapa hal ketika melakukan sekuritisasi. Pertama adalah proses sekuritisasi dimana aktor berusaha untuk mengidentifikasi sebuah isu untuk menjadi isu keamanan. Terdapat tiga unit utama dalam proses sekuritisasi, yaitu *referent object*, *securitizing actors*, dan *functional actors* (Buzan, Waeber, & Wilde, 1998). Dalam hal ini, negara disebut sebagai *securitizing actors* karena merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi. *Referent object* adalah pihak yang terancam oleh *existensial threat*. Sedangkan *functional actors* merupakan pihak luar yang mempengaruhi isu yang tersekuritisasi. Ketiga unit tersebut tidak berinteraksi secara langsung, namun saling mempengaruhi satu sama lain.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam melakukan sekuritisasi adalah *facilitating condition*, yaitu suatu keadaan yang mendukung isu tersebut untuk dilakukan sekuritisasi. Selanjutnya adalah *the units of security analysis* atau unit analisis keamanan dimana yang dimaksudkan disini adalah aktor yang menjadi rujukan sekuritisasi. Hal ke empat adalah *speech-act*, atau yang dapat dikatakan sebagai sebuah istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai mengancam. Namun *speech-act* tersebut tidak hanya sebatas oleh gagasan saja, melainkan juga sebuah tindakan yang dilakukan. Sedangkan yang terakhir dalam melakukan

sekuritisasi adalah *constellation of securitization* atau konstelasi sekuritisasi, yaitu sebuah proses pemetaan *security complex* yang bertujuan untuk menganalisis pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda.

Menurut Buzan, ancaman-ancaman atau yang disebut *existential threat* pada era keamanan non-tradisional ini ada lima, yaitu; isu militer yang kurang lebih membahas mengenai *forceful coercion*, isu politik yang membahas mengenai otoritas, status pemerintah, dan pengakuan, isu sosial yang membahas identitas kolektif, isu lingkungan yang membahas mengenai aktifitas manusia dan *planetary biosphere*, dan isu ekonomi yang membahas mengenai perdagangan, produksi, dan finansial (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Kasus penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura dapat menjadi salah satu isu sekuritisasi yang dilakukan pihak otoritas pelabuhan PSA Singapura dan Pemerintah Singapura karena secara jelas mengancam keamanan ekonomi Singapura. Adanya barang palsu yang masuk ke Singapura berarti pembayaran pajak yang diterima akan semakin menurun. Selain itu, adanya barang palsu dapat merugikan pihak-pihak seperti produsen, distributor, dan konsumen. Sedangkan otoritas pelabuhan PSA Singapura dan Pemerintah Singapura adalah *securitizing actor* yang melakukan sekuritisasi. Dalam isu ini, *referent object* atau pihak yang terancam cenderung sulit untuk diidentifikasi karena meliputi berbagai pihak. Pihak-pihak yang dapat merasa terancam adalah individu, negara, pelaku usaha, perusahaan, dan perusahaan jasa *kontainer* pengiriman barang dagang. Sedangkan

functional actors dalam isu ini adalah pengaruh yang didapatkan dari organisasi internasional yang mendesak untuk dilakukannya sekuritisasi terhadap isu tersebut.

Sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Singapura dan pihak otoritas pelabuhan PSA Singapura terhadap isu ekonomi yang terjadi merupakan salah satu refleksi dari adanya tindakan yang mengancam keadaan ekonomi Singapura, yaitu dari sektor perdagangan, keuangan, dan produksi/konsumsi. Dari hal ini muncul perdebatan mengenai aktor yang dapat melakukan sekuritisasi, apakah harus selalu pihak pemerintah, sekuritisasi bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk individu. Namun, sekuritisasi dapat berlaku secara efektif jika dilakukan oleh pihak yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu negara atau entitas lain seperti pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui konsep Total Defence merupakan hal yang unik mengingat Singapura hanya negara kecil yang hanya mengandalkan perdagangan internasional. Secara Geografis, Singapura merupakan satu negara yang terdiri dari satu kota besar saja. Dalam kamus Hubungan Internasional, hal ini disebut sebagai *city-state*, yaitu suatu negara yang wilayahnya terdiri dari satu area perkotaan dan tidak di dibagi dalam bentuk pemerintahan daerah *local government* (Ashari, 2015). Upaya sekuritisasi tersebut tidak jauh dari perkembangan kota Singapura itu sendiri.

Perkembangan Kota adalah suatu perubahan sebagian atau menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan kota baik perubahan sosial ekonomi, sosial

budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 1997). Sedangkan konsep perkembangan kota atau *city development* yang dikeluarkan oleh UNDP dikenal sebagai *City Development Index* (CDI) dimana konsep tersebut berhubungan dengan perkembangan kota dan wilayah urban yang dapat diukur. Hal-hal tersebut dapat berupa tingkat perkembangan, kondisi layak huni, , kerugian yang relative atau kemiskinan, dan kemacetan atau inklusivitas (UN-Habitat, 2002).

Konsep *development* atau perkembangan sendiri mempunyai arti sebagai serangkaian proses peningkatan kapasitas dibidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup warga negaranya. Namun sejak awal 1990-an, konsep ini telah bergeser menjadi sebuah upaya menciptakan kesejahteraan melalui pembentukan masyarakat yang berkesinambungan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang cenderung lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat (Ashari, 2015). Sehingga dalam penelitian ini, kualitas kehidupan masyarakat yang dimaksud dalam Teori Statistik Kriminal yang di ajukan oleh Quetelet berupa tingkat perkembangan kota Singapura yang diukur melalui CDI.

CDI yang diajukan oleh UNDP pada tahun 1997 secara tidak langsung sejalan dengan konsep perkembangan yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan warga suatu negara yang dapat diukur dalam beberapa indikator. Dalam CDI, indikator tersebut dibagi ke dalam lima sub-indikator utama, yaitu *produk kota*, Manajemen Pengolahan Limbah, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana

sebuah kota telah berkembang dan menjadi tolak ukur mengenai fokus pengembangan kota untuk tahun-tahun selanjutnya (UN-Habitat, 2001).

Dengan adanya penelitian ini, statistik kriminal dan CDI mempunyai hubungan dasar yang membuat penelitian ini dapat dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sub-indikator pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, dan manajemen limbah. Sub-indkator tersevut dapat dikategorikan sebagai suatu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sub-indikator produk kota merupakan hasil dari adanya usaha penguatan ekonomi kota tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, ACFTA atau perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh Singapura, dapat mempengaruhi tingkat perkembangan kota Singapura itu sendiri.

Indikator-indikator dalam CDI yang telah dipaparkan di atas saling berkesinambungan satu sama lain dan berperan penting dalam perkembangan kota Singapura. Perkembangan yang dilakukan tersebut merupakan upaya dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan usaha dan interaksi yang dilakukan, baik pemerintah maupun swasta, terhadap perekonomian, keuangan, komunikasi, kebudayaan, dll (Albrow & King, 1990). Integrasi tersebut mengizinkan dan memudahkan untuk melakukan mobilisasi melewati batas-batas negara dan perpindahan manusia, modal, data, barang, dan jasa (Albrow & King, 1990). Hal-hal tersebut termasuk didalamnya berupa pengurangan atau penghilangan kewajiban visa bagi pengunjung, tariff atau non-tarif dalam perdagangan internasional, kemudahan regulasi investasi, serta peningkatan konektivitas melalui transportasi dan infrastruktur

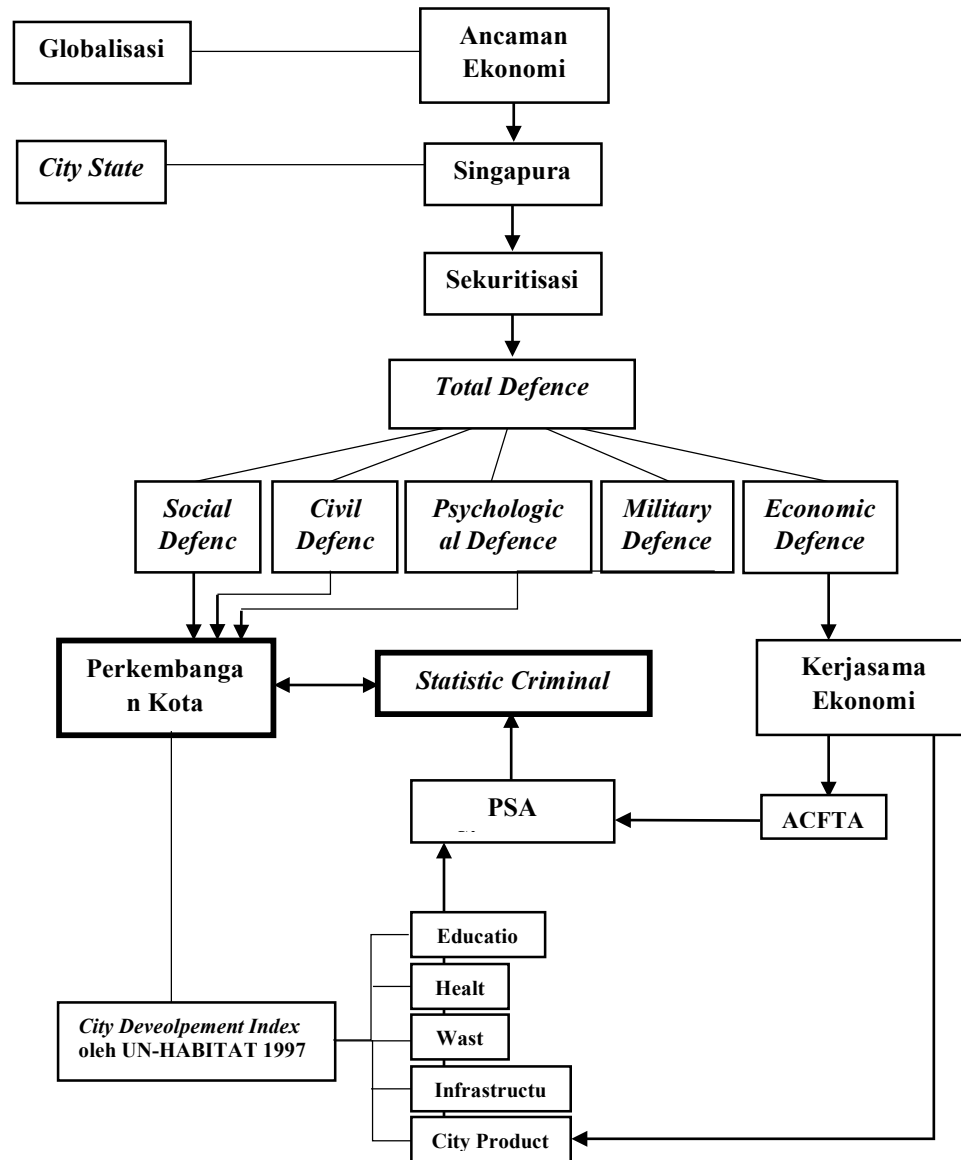
digital yang lebih baik. Globalisasi diperlukan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan untuk menghilangkan ancaman dan tantangan global yang semakin berkembang, seperti polusi udara dan polusi laut. Globalisasi telah menciptakan kemakmuran dan perkembangan ekonomi yang tinggi, tetapi juga telah membuat perbedaan pendapatan negara yang signifikan (Albrow & King, 1990).

Sedangkan internasionalisasi dapat diartikan sebagai usaha, baik pemerintah maupun swasta, dalam membuka kesempatan untuk mendapatkan efisiensi secara global, mengelola risiko dengan memanfaatkan fleksibilitas multinasional dan diversifikasi portfolio, percepatan inovasi dan pembelajaran, mengikuti customer global serta membangun reputasi (Grant, 2007). Hal ini didukung dengan adanya kesepakatan untuk membuka batasan perdagangan, penghapusan hambatan sehingga mendorong perdagangan global sebagai peluang dan tantangan.

1.6 Sintesis Teori

Untuk mempermudah kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, telah disajikan diatas berupa bagan penggambaran kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

Bagan 1.1 Penggambaran Kerangka Pemikiran



Jika dikaitkan dengan penelitian ini, secara konsep, penelitian ini dapat dilakukan karena Singapura merupakan *city-state* dan CDI dapat diaplikasikan kedalam Singapura secara keseluruhan. Wilayah Singapura yang relatif kecil dan dapat dijangkau secara mudah memusatkan aktivitas perdagangannya melalui pelabuhan

PSA Singapura. Keberadaan Pelabuhan PSA Singapura menjadi sangat penting karena menjadi satu-satunya pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tempat tujuan dan transit kapal-kapal kontainer sekaligus penggerak utama ekonomi Singapura. Selain itu, dengan adanya statistik kriminal mengenai aktivitas penyelundupan barang palsu yang tercatat di PSA Singapura, dapat menjadi pengukur kualitas tingkat perkembangan Kota Singapura.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah adanya perubahan tingkat keamanan pelabuhan PSA Singapura karena terdapat kenaikan angka pengungkapan penyelundupan barang palsu yang dipengaruhi oleh perubahan kualitas kota Singapura dan ACFTA.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual

1.8.1.1 Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya (Surakhmad, 1982).

1.8.1.2 Kejahatan

Kejahatan dapat ditinjau dari dua macam pengertian, pengertian sosial dan pengertian hukum. Di dalam pengertian sosial, Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial, atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai perilaku anti-sosial. Sedangkan dalam pengertian hukum, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran yang ditujukan kepada aturan hukum atau hukum pidana, dilakukan tanpa hak atau ijin dan dijatuhi hukuman oleh negara (Bohm & Haley, 2002).

1.8.2 Definisi Operasional

1.8.2.1 Pengaruh

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan dua indikator untuk mengukur sejauh mana pengaruh perkembangan kota singapura terhadap tingkat keamanan pelabuhan PSA Singapura. Dua indikator tersebut diambil dari apakah terjadi perubahan angka pengungkapan penyelundupan barang palsu atau tidak. Berikut ini adalah visualisasi dari indikator untuk penelitian ini.

Tabel 1.4 Indikator Pengaruh Perkembangan Kota terhadap Perubahan Pengungkapan Penyelundupan Barang Palsu di PSA Singapura

Tingkat Pengaruh Indikator	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh
Terjadi Perubahan Angka Pengungkapan		
Tidak ada Perubahan Angka Pengungkapan		

1.8.2.2 Kejahatan

Dalam Penelitian ini, kejahatan yang dimaksud adalah aktivitas penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura melalui pelabuhan PSA Singapura. Aktivitas tersebut dikatakan sebagai sebuah kejahatan karena merupakan aktivitas yang melanggar hukum dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman oleh penegak hukum yang berwenang.

1.8.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang mengambil suatu masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya penelitian dilaksanakan. Kemudian, hasil penelitian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai masalah yang ada. Dalam penulisan ini, penulis memberi gambaran penjelasan terkait penyebab meningkatnya angka penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura melalui PSA Singapura.

1.8.4 Jangkauan Penelitian

Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan batasan tahun penelitian adalah dari tahun 2010, dimana pada tahun ini, Singapura yang menjadi salah satu negara anggota ASEAN, mulai memberlakukan ASEAN-China Free Trade Area. Penelitian

ini dibatasi hingga tahun 2013 karena ,adanya penurunan terhadap masuknya barang palsu dari tahun 2013 ke tahun 2014.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengumpulan data, yaitu data sekunder (Creswell, 2003). Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yang menunjang penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia. Peneliti juga mengumpulkan data-data dari sejumlah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis data melibatkan pembuatan pengertian dan mencoba memahami dari data teks dan gambar. Proses ini melibatkan persiapan data untuk dilakukan analisis, melakukan analisis yang berbeda, serta menggali lebih jauh dalam memahami data yang mewakili data dan membuat intepretasi yang lebih besar dan lebih berarti dari data yang ada (Creswell, 2003). Berdasarkan proses ini, maka peneliti menggunakan tiga cara dalam menganalisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan konklusidari data.

1.8.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I penelitian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesis teori, dan metodologi penelitian.

BAB II ACFTA dan Penyelundupan Barang Palsu di Singapura

Pada bab ini disajikan data mengenai perdagangan yang dilakukan oleh Singapura dibawah berlakunya ACFTA.

BAB III Pengaruh Perkembangan Kota Singapura terhadap Peningkatan Penyelundupan Barang Palsu

Pada bab ini mengetahui tingkat keamanan PSA Singapura dan menjelaskan penyebab adanya peningkatan penyelundupan barang palsu.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil penelitian dan saran yang diberikan peneliti terkait dengan pengaruh pengembangan kota Singapura dengan tingkat keamanan PSA Singapura atas penyelundupan barang-barang palsu.